

The Impact Of The Effectiveness Of Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, And Regional Prosperity On The Financial Performance Of Regency And City Governments In Bali Province

Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Kemakmuran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Kadek Wulan Widya Utami^{1*}, Made Arie Wahyuni², Putu Yunartha Pradnyana Putra³

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha^{1,2,3}

[^{1*}](mailto:wulan.widya@student.undiksha.ac.id), [²](mailto:ariewahyuni@undiksha.ac.id),

[³](mailto:putuyunartha.pradnyana.putra@undiksha.ac.id)

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the effectiveness of Local Own-Source Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and regional prosperity on the financial performance of regency and city governments in Bali Province. The study employs a quantitative approach with a causal-associative design. The data used are secondary data sourced from Local Government Financial Reports (LKPD), Budget Implementation Reports (LRA), and regional fiscal data obtained from the Supreme Audit Agency (BPK), the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), and the Central Statistics Agency (BPS) for the period 2015–2024. The study population comprises nine regencies and cities in Bali Province. The sampling technique employed saturation sampling, resulting in 90 observations. Data analysis was conducted using multiple linear regression, preceded by descriptive statistical tests and classical assumption tests. The results indicate that the effectiveness of Local Original Revenue does not have a significant effect on local government financial performance. Conversely, the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund have a negative and significant effect on the financial performance of local governments. Meanwhile, regional prosperity has a positive and significant effect on the financial performance of local governments. These findings indicate that increasing local fiscal capacity and autonomy by enhancing regional prosperity is a key factor in improving the financial performance of local governments and reducing their dependence on transfer funds from the central government.

Keywords: *effectiveness of local revenue, financial performance of local governments, general allocation funds, regional prosperity, special allocation funds.*

ABSTRAK

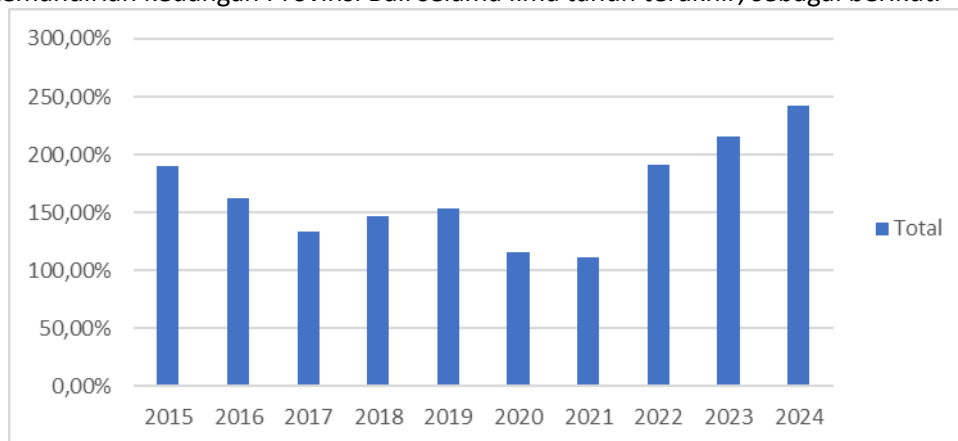
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kemakmuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta data fiskal daerah yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2015–2024. Populasi penelitian meliputi sembilan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh sehingga diperoleh 90 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda yang diawali dengan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, kemakmuran daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah melalui penguatan kemakmuran daerah menjadi

faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kata kunci: Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Kemakmuran Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1. Pendahuluan

Akuntansi publik berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberi kewenangan mengelola keuangan melalui desentralisasi fiskal dengan tetap menerapkan transparansi dan sistem pengendalian internal untuk meningkatkan kinerja keuangan (Perpres, 2014). Kinerja keuangan daerah diukur menggunakan berbagai rasio keuangan, salah satunya rasio kemandirian daerah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri, 2006). Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan daerah membiayai kebutuhannya sendiri melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer; semakin tinggi nilainya, semakin rendah ketergantungan daerah pada pemerintah pusat (Halim, 2007). Provinsi Bali memiliki perekonomian yang didominasi sektor pariwisata sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor tersebut. Penurunan aktivitas pariwisata saat pandemi COVID-19 menyebabkan PAD menurun dan meningkatkan ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Kondisi ini tercermin pada rasio kemandirian keuangan Provinsi Bali selama lima tahun terakhir, sebagai berikut.



Gambar 1. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2024

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan Gambar 1, terlihat adanya tren peningkatan rasio kemandirian daerah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 hingga 2021, rasio kemandirian menunjukkan penurunan yang dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menjadi pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi daerah. Namun setelah tahun 2022, tingkat rasio kemandirian mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 rasio naik hingga mencapai sekitar 190% , kemudian meningkat menjadi 215% ditahun 2023, hingga puncaknya tahun 2024 mencapai 240%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa provinsi Bali mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah nya seiring dengan peningkatan tingkat rasio kemandirian, hal ini berkaitan dengan menurunnya ketergantungan dana transfer dan peningkatan PAD provinsi Bali. Namun, data rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2015–2024 menunjukkan masih adanya disparitas yang cukup tinggi antardaerah. Kabupaten Badung memiliki tingkat kemandirian fiskal yang sangat tinggi, sedangkan Bangli, Jembrana, dan Karangasem masih mencatatkan rasio di bawah 50%, yang menunjukkan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat (Halim, 2007). Perbedaan tersebut mencerminkan variasi kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, serta

kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola keuangan secara efektif (Devi et al., 2020).

Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu kemampuan pemerintah merealisasikan target penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah (Permendagri, 2022). Di Provinsi Bali, efektivitas PAD masih berfluktuasi antar kabupaten/kota pada periode 2015–2024, yang mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas PAD mencerminkan kualitas tata kelola fiskal (Permendagri, 2006), sehingga peningkatannya melalui pengendalian internal yang baik dapat mendorong kinerja keuangan daerah (Prayudi et al., 2018). Hal ini didukung oleh penelitian Anynda dan Hermanto (2021) serta Adiputra et al. (2026) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah apabila didukung oleh pengelolaan dan perencanaan anggaran yang optimal.

Selain efektivitas PAD, kinerja keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berfungsi mendukung pemerataan kapasitas fiskal dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah (Indonesia, 2022). Di Provinsi Bali, DAU masih menjadi sumber pendanaan penting, terutama bagi kabupaten/kota dengan PAD rendah, meskipun tren penerimaannya cenderung menurun selama periode 2015–2024. Pemanfaatan DAU yang efektif berperan dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kinerja keuangan daerah, sehingga manfaatnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana secara efisien (Erawati & Kelep, 2023).

Selain DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berperan penting dalam membiayai program prioritas nasional, seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, baik melalui DAK Fisik maupun DAK Nonfisik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, DAK diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Namun, alokasi DAK antar kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2015–2024 masih menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana transfer dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Penelitian Pradana dan Handayani (2023) menyatakan bahwa tingginya ketergantungan terhadap DAK mencerminkan rendahnya kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat kemakmuran daerah (*wealth*), yang mencerminkan kemampuan daerah menghasilkan pendapatan melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Peningkatan PAD menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong investasi dan pembangunan daerah (Millenia, 2022). Di Provinsi Bali, tingkat kemakmuran daerah tahun 2015–2024 menunjukkan perbedaan yang cukup besar antarkabupaten/kota. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memiliki tingkat kemakmuran yang relatif tinggi karena didukung sektor pariwisata dan jasa, sedangkan Bangli, Karangasem, dan Jembrana masih menunjukkan tingkat kemakmuran yang rendah serta lebih bergantung pada dana transfer. Variasi tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah berpengaruh terhadap kapasitas fiskal, sehingga kemakmuran daerah menjadi faktor penting dalam menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah (Vijaya et al., 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh efektivitas PAD, DAU, DAK, dan kemakmuran daerah (*wealth*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Efektivitas PAD dilaporkan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan oleh Ilmi (2023) dan Anynda dan Hermanto (2021), namun tidak berpengaruh atau bahkan berpengaruh negatif menurut Azhar (2021) serta Khoiriyah dan Alliyah (2025). Temuan mengenai DAU dan DAK juga beragam, di mana Ardhana (2023), Ismayasari et al.

(2024), Fatmawati dan Sapari (2020), serta Lutfiani (2017) menunjukkan hasil yang berbeda dengan Rohanda dan Azhar (2023). Demikian pula, pengaruh kemakmuran daerah terhadap kinerja keuangan masih menunjukkan inkonsistensi, sebagaimana ditemukan oleh Iswantini et al. (2021), Millenia (2022), Aulia dan Rahmawaty (2020), serta Purgiyanti dan Purbasari (2023). Inkonsistensi tersebut menunjukkan perlunya penelitian lanjutan pada konteks Provinsi Bali yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis pariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan empiris dan kontekstual dalam memahami hubungan antara efektivitas pengelolaan PAD, DAU, DAK, dan Kemakmuran Daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Kesenjangan ini penting untuk diteliti lebih lanjut agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Kemakmuran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kemakmuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta data fiskal daerah yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2015–2024. Populasi penelitian meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali yang berjumlah 9 daerah, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Dengan periode pengamatan selama 10 tahun, penelitian ini menghasilkan 90 observasi.

Variabel dependen adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan menurut Halim (2007). Variabel independen terdiri atas efektivitas PAD yang diukur menggunakan rasio efektivitas PAD (Permendagri, 2006), DAU dan DAK yang diukur berdasarkan proporsi realisasi dana transfer terhadap total pendapatan daerah, serta kemakmuran daerah yang diukur melalui perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah (Sudarsana & Rahardjo, 2013). Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Chin, 1998) serta uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif mampu memberikan gambaran karakteristik data dari 90 observasi penelitian berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai rata-rata sebesar 1,0001 yang mengindikasikan tingkat efektivitas PAD tergolong sangat efektif dengan variasi data yang relatif rendah. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki rata-rata sebesar 0,3867 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,1021, yang menunjukkan proporsi

dana transfer antar daerah relatif stabil meskipun kontribusi DAK masih rendah. Sementara itu, kemakmuran daerah memiliki rata-rata sebesar 0,2899 dengan standar deviasi yang cukup besar, mencerminkan adanya perbedaan tingkat kemakmuran antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki rata-rata sebesar 1029,0889 dengan standar deviasi sebesar 1863,40369, yang menunjukkan adanya disparitas kinerja keuangan yang cukup tinggi, di mana beberapa daerah memiliki tingkat kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan daerah lainnya.

Uji Asumsi Klasik

Analisis uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan statistik sehingga layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, dibuktikan dengan penyebaran titik pada grafik *Normal P-P Plot* yang mengikuti garis diagonal serta nilai *Asymp. Sig.* uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 ($>0,05$) (Ghozali, 2021). Uji multikolinearitas juga menunjukkan tidak adanya korelasi antarvariabel independen karena seluruh nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 (Ghozali, 2021). Pada uji heteroskedastisitas, metode Glejser mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai signifikansi 0,022 ($<0,05$), sehingga analisis dilanjutkan menggunakan *Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors* (HC3) untuk memperoleh estimasi yang lebih robust terhadap heteroskedastisitas (White, 1980). Selanjutnya, uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,840 yang berada pada rentang $du < d < 4 - du$, sehingga model regresi dinyatakan tidak mengalami autokorelasi (Santoso, 2019; Sugiyono, 2023). Dengan demikian, model regresi dinilai layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, pengujian dua atau lebih variabel independen terhadap dependen dapat menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. variabel independen dalam penelitian ini diantaranya Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Kemakmuran Daerah. Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan. adapun hasil uji analisis regresi linear berganda disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,894	0,024		121,735	0,000
TRNX1	0,022	0,041	0,003	0,544	0,588
TRNX2	-0,763	0,022	-0,425	-34,670	0,000
TRNX3	-0,065	0,015	-0,033	-4,228	0,000
TRNX4	1,054	0,019	0,593	55,138	0,000

(Sumber: Data Diolah, 2026)

Berdasarkan hasil tersebut, maka didapatkan hasil persamaan regresi yaitu sebagai berikut.

$$Y = 2,894 + 0,022 X_1 + 0,763 X_2 + 0,065 X_3 + 1,054 X_4 + e$$

Berdasarkan model persamaan tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 2,894 menunjukkan bahwa apabila Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Kemakmuran Daerah dianggap konstan, maka nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 2,894.
2. Koefisien Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0,022 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,022 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien Dana Alokasi Umum (X_2) sebesar -0,763 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Dana Alokasi Umum akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,763 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Koefisien Dana Alokasi Khusus (X_3) sebesar -0,065 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Dana Alokasi Khusus akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,065 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
5. Koefisien Kemakmuran Daerah (X_4) sebesar 1,054 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Kemakmuran Daerah akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 1,054 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R Square karena telah mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model (Ghozali, 2021). Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,999	0,997	0,997	0,02456

(Sumber: Data Diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai *R Square* dan *Adjusted R Square* sebesar 0,997. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 99,7% variasi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dijelaskan oleh efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan kemakmuran daerah, sedangkan sisanya sebesar 0,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar 0,02456 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang rendah, sehingga model regresi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan dan memprediksi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Uji t

Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai *t* hitung sebesar 0,557 dengan nilai signifikansi sebesar 0,579. Nilai tersebut menunjukkan bahwa *t* hitung lebih kecil dari *t* tabel ($0,557 < 1,989$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,579 > 0,05$). Dengan demikian, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai *t* hitung sebesar -19,791 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai absolut *t* hitung lebih besar dari *t* tabel ($19,791 > 1,989$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah. Koefisien regresi sebesar -0,763 menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi bersifat negatif. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai t hitung sebesar -2,033 dengan nilai signifikansi sebesar 0,045. Nilai absolut t hitung lebih besar dari t tabel ($2,033 > 1,989$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,045 < 0,05$), sehingga Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Koefisien regresi sebesar -0,065 mengindikasikan bahwa arah pengaruh yang terjadi adalah negatif. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Pengaruh Kemakmuran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Kemakmuran Daerah memiliki nilai t hitung sebesar 44,391 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($44,391 > 1,989$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga Kemakmuran Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Koefisien regresi sebesar 1,054 menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi bersifat positif. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, pemerintah sebagai *steward* bertanggung jawab mengelola sumber daya daerah secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya efektivitas PAD seharusnya mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Namun, peningkatan efektivitas PAD belum tentu diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan karena pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dan tata kelola keuangan juga menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan PAD (Musmini et al., 2022).

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Anynda dan Hermanto (2021) serta Julia et al. (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali mampu merealisasikan target PAD secara efektif, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan dana transfer. Di samping itu, sebagian besar PAD masih digunakan untuk membiayai belanja operasional sehingga belum mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan secara optimal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrumen transfer fiskal yang bertujuan mengurangi kesenjangan kapasitas keuangan antardaerah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana transfer secara efektif dan bertanggung jawab demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tingginya ketergantungan terhadap DAU justru menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan secara mandiri masih rendah sehingga dapat menurunkan tingkat kemandirian dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kualitas pengelolaan laporan keuangan juga menjadi faktor penting dalam memastikan pemanfaatan dana transfer berjalan secara optimal (Adiputra et al., 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ismayasari et al. (2024) dan Widowati et al. (2024) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besarnya proporsi DAU dalam struktur pendapatan daerah dapat mengurangi dorongan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Akibatnya, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat semakin tinggi dan berdampak pada menurunnya tingkat kemandirian fiskal daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer yang dialokasikan untuk membiayai program tertentu sesuai prioritas nasional. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, pemerintah daerah berkewajiban mengelola dana tersebut secara efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, penggunaan DAK yang bersifat spesifik dan memiliki keterbatasan fleksibilitas menyebabkan kontribusinya terhadap peningkatan kinerja keuangan menjadi kurang optimal. Selain itu, kebutuhan dana pendamping dan biaya pemeliharaan aset setelah pembangunan dapat meningkatkan beban keuangan daerah apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang efektif (Adiputra et al., 2014).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Widowati et al. (2024) serta Pradana dan Handayani (2023) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar alokasi DAK yang diterima, semakin menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan DAK belum sepenuhnya mencerminkan meningkatnya kapasitas fiskal maupun kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kemakmuran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kemakmuran daerah mencerminkan kemampuan ekonomi suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, pemerintah sebagai *steward* dituntut mengelola potensi ekonomi secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemakmuran yang tinggi akan memperluas basis penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi, mengurangi ketergantungan pada dana transfer, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja keuangan pemerintah daerah (Atmadja et al., 2021).

Temuan penelitian ini sejalan dengan Ernawati (2023), Kusuma dan Handayani (2017), serta Rohanda dan Azhar (2023) yang menyatakan bahwa kemakmuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Daerah yang memiliki tingkat kemakmuran lebih tinggi umumnya mempunyai basis ekonomi dan potensi pajak yang lebih kuat sehingga mampu membiayai pembangunan secara lebih mandiri. Meskipun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Apriani (2024) yang tidak menemukan pengaruh signifikan, yang diduga dipengaruhi oleh perbedaan indikator kemakmuran, karakteristik wilayah penelitian, maupun variabel kontrol yang digunakan.

4. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali, yang mengindikasikan bahwa keberhasilan mencapai target PAD belum mampu meningkatkan kinerja keuangan secara menyeluruh. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, semakin rendah tingkat kinerja keuangan daerah. Sementara itu, kemakmuran daerah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas ekonomi dan kemampuan fiskal yang lebih baik cenderung mampu mengelola keuangan secara lebih mandiri serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk meningkatkan kualitas kajian dengan menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti Belanja Modal, Dana Bagi Hasil (DBH), Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, *Fiscal Stress*, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ukuran pemerintah daerah, maupun tata kelola pemerintahan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mengoptimalkan pengelolaan PAD, mengurangi ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong peningkatan kemakmuran daerah melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan, investasi, dan pemberdayaan UMKM. Penelitian berikutnya juga disarankan memperluas cakupan wilayah hingga provinsi lain atau seluruh Indonesia serta memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian lebih komprehensif, memiliki daya generalisasi yang lebih tinggi, dan mampu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Adiputra, I. M. P., Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2014). Culture of Tri Hita Karana as Moderating Effect of Locus of Control on the Performance of Internal Auditor (Studies in the Office of the Provincial Inspectorate in Bali). *Research Journal of Finance and Accounting*.
- Adiputra, I. M. P., Muttiwijaya, G. T. P., Adnyana, I. D. G. A. J., & Yasrawan, K. T. (2026). The Budget Ratcheting, Original Local Government Revenue Original Local Government Revenue, Fiscal Balance Fund On Capital Expenditure Allocations In Indonesia. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 17(2), 235–246. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/download/14238/7203>
- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://www.emerald.com/ajar/article/3/1/123/14153>
- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2021). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 09(10), 1–20. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3690>
- Ardhana, M. A. (2023). Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. *Management and Accounting Research Statistics*, 3(1), 84–105. <https://doi.org/https://jurnal.ilrscentre.or.id/index.php/mars>
- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., Tama, G. M., & Paranoan, S. (2021). Influence of human resources, financial attitudes, and coordination on cooperative financial management. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 563–570. <https://koreascience.kr/article/JAKO202104142224615.pdf>
- Aulia, R., & Rahmawaty. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(4), 584–598. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164–174. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>

- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, November, 295–336.
- Devi, S., Masdiantini, P. R., Dewi, P. E. D. M., & Diputra, I. B. R. P. (2020). E-link service synergy, perceived risk management, and tri hita karana in LPD in driving financial inclusion. *5th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management and Social Science (TEAMS 2020)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.033>
- Erawati, T., & Kelep, E. K. (2023). Hubungan Dana Alokasi Umum, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lembata. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 305–317. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1119>
- Ernawati, N. D. (2023). *Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kalimantan selatan tahun 2019-2021*. 6, 245–256. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v6i2.1178>
- Fatmawati, T. O., & Sapari. (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Ilmi, M. B. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Size Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemda. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 216–223. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.251>
- Ismayasari, C., Ariessa, Y., & Budi, W. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi, Dana Umum, Alokasi Khusus Dan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2016-2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 48–57. <https://doi.org/10.69714/7d235309>
- Iswantini, D. A., Hirmantono, A., & Natalia, R. (2021). Pajak daerah, intergovernmental revenue dan kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Lamongan). *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 37(1), 32–45. <https://ejournal.ahmaddahlan.ac.id/index.php/melati/article/view/4>
- Julia, R., Yulina, B., & Mayasari, R. (2025). Pengaruh Belanja Daerah, Fiscal Stress, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Rina Julia 1 , Bainil Yulina 2 , Riana Mayasari 3. *Jurnal Mediasi*, 8(1), 147–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmediasi.v8i1.20090>
- Khoiriyah, M. Z., & Aliyah, S. (2025). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 22(2), 270–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmwe.v22i2.19473>
- Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik*. 6.
- Lutfiani, A. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015*. [Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9036>
- Millenia, N. A. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448>

- Musmini, L. S., Luh, N., Erni, G., Adi, G., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Understand the Meaning of Togetherness in Credit Cooperative Financial Management. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(4), 1433–1445.
- Permendagri. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Permendagri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Permendagri. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-12-tahun-2019>
- Permendagri. (2022). *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Issue 104172)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Perpres. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. In Peraturan Perundang-undangan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2), 192–209. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>
- Prayudi, M. A., Dewi, G. A. K. R. S., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2018). Teori peran dan konsep expectation-gap fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 449–467. <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/download/3931/441>
- Prayudi, M. A., Pasek, N. S., & Yudiantara, I. G. A. P. (2021). Giving the Authority to Subordinates: Does Budget Participation Really Affect Budgetary Slack in Public Sector? *6th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2021)*, 328–321. <https://www.atlantispress.com/article/125964259.pdf>
- Purgiyanti, M. D., & Purbasari, H. (2023). Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2017-2020) [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. In *UMSLibrary*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/109629>
- Reni Dwi Apriani, S. W. S. (2024). *DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemda Se Jawa Timur Tahun 2020-2022)*. 13(1), 1–12.
- Rohanda, A., & Azhar, I. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(5), 287–301. <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i5.8367>
- Santoso, S. (2019). *Mahir Statistik Parametrik*. Elex Media Komputindo.
- Sinarwati, N. K., & Prayudi, M. A. (2021). Kinerja badan usaha milik desa dan kontribusinya bagi pendapatan asli desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 505–518.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4), 1–13. <http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In Sutopo (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Cetakan Ke, Vol. 11, Issue 1). ALFABETA.
- Vijaya, D. P., Irwansyah, M. R., & Dewi, N. W. Y. (2022). Financial Distress Of Companies Listed On Indonesian Stock Exchange During Covid-19 Pandemic. *JIMAT (Jurnal Ilmiah*

- Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 13(4), 1285–1300.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/54289/24105>
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. *Econometrica*, 48(4), 817–838.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1912934>
- Widowati, N., Mulyana, D., & Supriadi, A. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. In *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* (Vol. 2, Issue 3). <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i3.1252>